

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PSI Desak Mendagri Kasih 'Kartu Kuning' ke Anies

JAKARTA - Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera memberikan 'kartu kuning' kepada Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, Anies dinilai tak transparan dalam perancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. "PSI DKI Jakarta meminta Pak Tito Karnavian, agar segera memberikan 'kartu kuning' kepada Gubernur Anies Baswedan," ungkap Rian saat konferensi pers di ruang Fraksi PSI di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Ia menilai, delapan anggota PSI yang telah dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta selama hampir dua bulan terakhir belum memiliki data rinci dari KUA-PPAS APBD 2020. "Kita sudah pernah bersurat secara formal sejak awal Agustus meminta data rinci, data komponen. Sampai hari ini kita tidak disediakan juga. Lebih mirisnya lagi, kita tahu tenggat waktu pembahasan APBD 2020 hanya tinggal satu bulan untuk membahas KUA-PPAS dan juga APBD. Di saat kita tahu idealnya untuk membahas ini bisa tiga sampai empat bulan," papar dia.

"Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini Gubernur Anies Baswedan tidak bekerja secara transparan. Lebih mirisnya lagi kami sebagai mitra kerja dari Gubernur Anies Baswedan itu mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini dari media massa," lanjut dia.

Rian juga menyoroti bahwa anggaran KUA-PPAS APBD 2020 yang sempat diserahkan kepada DPRD DKI ternyata direvisi penurunan hingga Rp7 triliun. "Di situ juga kita tahu bahwa ada nilai anggaran yang turun sebesar Rp7 triliun, ditambah lagi ada hal yang menurut kami cukup mengagetkan di saat kita tahu ada anggaran Rp1 miliar untuk satu orang influencer, untuk promosi pro-

gram-program DKI Jakarta," kata dia. Ia meminta agar Gubernur Anies segera membuka ke publik anggaran KUA-PPAS APBD 2020 agar masyarakat bisa memantau langsung. "Sudah berbulan-bulan kami meminta agar Gubernur Anies Baswedan membuka anggarannya. Ini jadi sekali lagi kami minta agar Pak Mendagri memberikan kartu kuning pada Anies Baswedan," pinta dia.

Rian mengatakan, terdapat dua konsekuensi politik yang akan berimplikasi ke para anggota DPRD DKI Jakarta dari ketidakterbukaan anggaran KUA-PPAS 2020 oleh Pemprov DKI Jakarta. "Pertama DPRD DKI dengan segala daya upayanya terpaksa mengesahkan anggaran yang tidak maksimal. Karena tenggat waktunya tinggal satu bulan. Itu adalah opsi politik pertama," kata dia.

"Dan kedua adalah DPRD DKI bekerja lebih total menganalisa anggarannya, dan mungkin akan lebih dari tenggat waktu, dengan konsekuensi tidak diberikan gaji. Kalau sampai opsi kedua ini terjadi, kami menganggap ini adalah kesalahan total dan fatal Gubernur Anies Baswedan. Karena pihak yang menahan data rinci itu bukan di teman-teman DPRD, tapi di Gubernur Anies Baswedan. Kami berharap kesalahan seperti ini Mendagri turun dan memberikan kartu kuning," tambah dia.

Dia juga mengatakan, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad Pemprov DKI Jakarta telah mengubah rencana anggaran atau rencana KUA-PPAS 2020 dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun. PSI DKI menilai penurunan anggaran itu menunjukkan adanya ketidakcakapan dalam penganggaran. "Dokumen yang sebelumnya diberikan ke kami nilainya Rp96 triliun, tapi pas di rapat Banggar berkurang. Dari sisi eksekutif ada ketidakcakapan dalam penganggaran," beber dia.

Idris menyebut perlu adanya perincian terkait berkurangnya jumlah KUA-PPAS. Di antaranya di sektor mana saja terjadi pengurangan dan penambahan. "Nah Rp7 triliun ini baik di belanja langsung maupun tidak langsung, pengurangan dan penambahan di sektor mana. Komisi mana? SKPD mana? Bahkan sebenarnya lebih tajam lagi kegiatan mana, hingga komponen-komponen apa yang dikurangi, sehingga kegiatan itu berkurang atau bertambah. Nah secara substantif pertanyaan ini penting dalam pembahasan anggaran," tuturnya.

Idris mengatakan, penurunan jumlah KUA-PPAS tersebut bukan hal yang sedikit serta belum terinformasikan dengan baik ke masyarakat. Terlebih, menurutnya, proses atau keputusan penurunan dilakukan secara tertutup. "Karena angka Rp7 triliun bukan nilai yang kecil. Kenapa? Karena kita jadi penasaran anggaran yang dipotong yang mana sih? Apakah anggaran yang berdampak langsung terhadap masyarakat atau hanya potong PMD saja. Inilah yang masyarakat belum bisa terinformasikan dengan baik. Masih perlu dipertanyakan kecakapan dari sisi eksekutif karena anggaran Rp7 triliun bisa turun kayak gitu, terus prosesnya juga tertutup," sambung dia.

Dia juga menilai, terdapat pertanyaan besar terkait permintaan Anies untuk menyisir anggaran di antaranya anggaran untuk influencer. Menurutnya, masyarakat perlu berpartisipasi mengawasi APBD 2020. "Kenapa kami lihat perencanaan ini menjadi sangat penting, contohnya kemarin misalnya anggaran pariwisata influencer, terus Pak Anies meminta menyisir kembali. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Jutaan warga Jakarta ikut berpartisipasi mengawasi, APBD itu uang rakyat bukan uang DPRD, bukan uang gubernur tapi uang rakyat Jakarta," kata Idris. (aen)